

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I Putu Jati. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020.
- Creswell, Jhon W, trans. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hidayah, Fitria Nur. 2023. "Analisis Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Magelang)". Thesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Indonesia Corruption Watch. 2020. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat COVID-19", <https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dan-akuntabilitas-pengadaan-barang-dan-jasa-saat-covid-19>, diakses pada 20 Juli 2022.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Presiden Republik Indonesia. 20 Maret.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Presiden Republik Indonesia. 13 April.
- Medistiara, Yulida. 2020. "Ketua KPK Paparkan 4 Potensi Korupsi Penanganan Corona". DetikNews, 30 Agustus. Diakses pada 20 Juli 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5152360/ketua-kpk-paparkan-4-potensi-korupsi-penanganan-corona>.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Journal Administration and Society.
- Muhaimin. 2020. "Peran Strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Masa Pandemi COVID-19 Tinjauan dari Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Neraca, Volume 16, Nomor 2.

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri. 14 Maret.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden Republik Indonesia. 16 Maret.
- Pranata, Ibnu Madani. 2022. “Strategi Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Penanganan COVID-19 Di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan”. Thesis Gelar Diploma. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pratiwi, Nurina Vidya, dan Bondan Wahyusari Kusumo. 2020. “Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Darurat COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Pengawasan, Volume 2, Nomor 2.
- Purba, Sungkunen. 2021. “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengadaan Barang Bidang Kesehatan Masa Pandemi COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara”. Thesis Gelar Diploma. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugimin. 2021. “Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Diakses pada 20 Juli 2022. <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Tulisan-Hukum-PBJ-selama-pandemi-covid.pdf>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/859/IJ Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan COVID-19.

Kasmad, Rulinawaty. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Presiden Republik Indonesia. 31 Maret.

Zakariya, Rizki. 2021. "Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID-19 di Daerah". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Volume II, Nomor 2